

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014
DALAM PERSEFEKTIF FIQIH SIYASAH
(Study di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas
Kabupaten Siak)**

SKRIPSI

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH

MERRY ERA ADRIYANI

NIM. 11724200888

**PRODI STUDI SI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa (Studi Kasus Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak), yang ditulis oleh :

Nama : **Merry Era Adriyani**
 NIM : 11724200888
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam bidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 Juni 2021
 Pembimbing Skripsi

Haswir, M.Ag
 NIP. 19691119 199603 1 002

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQIH SIYASAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak)" Yang ditulis oleh :

Nama : **MERRY ERA ADRIYANI**
 NIM : 11724200888
 Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasa

Telah di Munaqasyahkan Pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 11 Oktober 2021
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
 Waktu : 13.00 WIB

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Oktober 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji I

Mohammad Abdi Almaktsur, MA

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Merry Era Adriyani
 NIM : 11724200888
 Tempat, Tgl. Lahir : MINANG 18 Oktober 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah & Ilmu Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan Plural Siyasah Terhadap Pelaksanaan pembangunan
 Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
 114 Tahun 2014 Tentang pembangunan Desa (Study Kasus
 Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 September 2021
 membuat pernyataan



METERAI
 TEMPEL
 EC281AJX408313100

Merry Era Adriyani
 NIM: 11724200888

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Merry Era Adriyani (2021) : Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa (Studi Kasus Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembangunan desa di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang hanya terfokus kepada pembangunan fisik saja. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pembangunan Desa harus dilakukan pembangunan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana orientasi pembangunan Desa Menurut PERMANDEGRI Nomor 114 Tahun 2014, bagaimana pelaksanaan Pembangunan Desa di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak berdasarkan PERMANDEGRI Nomor 114 Tahun 2014 tentang pembangunan Desa di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan bagaimana pelaksanaan pembangunan Desa di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam persepektif Fiqih Siyasah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuisuoner, dokumnetasi dan pustaka.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan Desa di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak secara sistematis sudah sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pembangunan Desa. Akan tetapi secara substansi pembangunan di Kampung ini masih jauh dari harapan dan cita-cita yang maju. Sedangkan dalam konteks Fiqih Siyasah pembangunan memiliki prinsip dan tujuan yang pada intinya harus mementingkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Fiqih Siyasah.

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahil‘alamin dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa dalam Persepektif Fiqih Siyasah (Study Kasus Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak)**. Penyusunan skripsi ini merupakan langkah awal untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) (S1), Fakultas Syari‘ah dan Hukum. Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do’a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua saya, Ibunda tercinta Erna Susanti dan Ayahanda Muhammad Amin, adik-adik saya Muhammad Ariansyah, Syifa Asyafia dan Muhammad Syafiq Alfatih beserta keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta kasih sayang dan do’a sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai wakil rektor I, bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai wakil rektor II, bapak Edi Erwan, S.PT., M.Sc., Ph.D sebagai wakil rektor III beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, bapak Dr. H. Eрман, M.Ag selaku wakil dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II, ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum dan beserta jajarannya.
 4. Bapak Rahman Alwi, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 5. Bapak Haswir, M. Ag sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan dibangku kuliah.
 7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, atas tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmu dalam perkuliahan.
 8. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Tata Negara (Siyasah) kelas A, B, C angkatan 2017 atas kebersamaan selama 3,5 tahun untuk bersama-sama menimba ilmu di kelas serta alumni SDN 005, Pondok Pesantren Baiturrahman An-Nizhom.
11. Untuk teman seperjuangan bar-bar Squad Nirma Mariana, Fitriyani Maruli, Desti Rambe dan Recha Tamara Putri yang telah membersamai proses awal penulisan skripsi ini dan dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis.
12. Kepada kantor Desa dan Badan Permusyawaratan Kampung dan para Staf nya yang telah menerima dengan baik penulis mengadakan penelitian di kantor tersebut.
13. Kepada Teman Saya Diana Puspita Sari dan Uci Wulamdari yang telah sabar antar jemput membawa penulis untuk bimbingan.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan do'a dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jazakumullah khairan katsiron, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal'amin.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2021
Penulis

MERRY ERA ADRIYANI
NIM : 11724200888

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kampung Minas Timur Kecamatan Minas	15
B. Visi Dan Misi Kampung Minas Timur	16
C. Geografis Kampung Minas Timur	17
D. Pemerintahan Kampung Minas Timur	18
E. Keadaan Sosial Kampung Minas Timur.....	18
F. Kelembagaan yang ada di Kampung Minas Timur	21
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Persepektif Fiqih Siyasah.....	37
1. Profil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.....	37
2. Konsep Pembangunan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014	39
3. Pembangunan Menurut Fiqh Siyasah	48
B. Siyasah Dusturiyah	56

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Orientasi Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan	61
B. Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak	62
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.....	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasai dan Sampel	12
Tabel II.1	Jumlah Penduduk.....	19
Tabel II.2	Tingkat Pendidikan.....	19
Tabel II.3	Pekerjaan.....	20
Tabel IV.1	Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sudah Sangat Baik	65
Tabel IV.2	Tanggapan Responden Tentang Pemerintahan Desa Sangat Berpartisipasi Aktif Dalam Pembangunan	66
Tabel IV.3	Tanggapan Rensponden Tentang Pemerintahan Desa Melakukan Pembinaan Untuk Masyarakat.....	66
Tabel IV.4	Tanggapan Responden Tentang Pemerintahan Desa Melakukan Upaya Untuk Mengurangi Angka Kemiskinan ..	67
Tabel IV.5	Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Sudah Merasa Puas Dengan Upaya Pemerintah Desa Dalam Hal Pembangunan Desa.....	70
Tabel IV.6	Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah Desa Melakukan Pembangunan Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bentuk Upaya Pembangunan Desa Di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak .	71
Tabel IV.7	Tanggapan Responden Mengenai Badan Permusyawaratan Desa Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Sebagai Upaya Perencanaan Pembangunan	72
Tabel IV.8	Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Dapat Menyalurkan Aspirasi Kepada Pemerintah Desa Dalam Proses Perencanaan Pembangunan.....	73
Tabel IV.9	Tanggapan Responden Mengenai Pembangunan Desa Meliputi Beberapa Bidang Diantaranya Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Sudah Berjalan Dengan Baik.....	74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.10 Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Dapat Berpartisipasi Dalam Pembangunan Desa.....	76
Tabel IV.11 Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Pemerintahan Desa Sangat Baik Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa	77
Tabel IV.12 Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah Desa Sudah Berupaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Usaha Pembangunan Desa	77
Tabel IV.13 Tanggapan Responden Mengenai Kebijakan Pejabat Kelurahan/Kampung Terhadap Pembangunan Desa Sudah Tepat	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahnya daerah Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa. Dengan demikian, desa adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah harus mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi, yaang diarahkan untuk mempercepat pembagunan di daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan serta peran aktif masyarakat. Pemerintahan daerah terbagi kedalam Daerah beberapa pemerintahan baik Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan yang terkecil Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang merupakan Pemerintahan terdepan dan menjadi dasar pemerintahan dalam Negara Kesatuan Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.¹

Kewenangan bidang lain yang dimaksud yaitu meliputi kebijakan perencanaan Nasional dan pengendalian Nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi Nasional. otonomi daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya.²

Pemerintah desa adalah satuan pemerintahan terendah. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Pemerintahan desa memiliki hak otonomi penuh yaitu berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, yang artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut kebutuhan dan memutuskan

¹ H.A Rosid, *Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Raja, 2002), h. 266.

² Naewoko dan Bagong Suyatno, *Sosiologi Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 160.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam tugas tersebut, pemerintah desa bersama BPD dan juga perangkat desa dapat menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan, pemerintah desa mempunyai peran fasilitatif, edukasional, representasional, dan peran teknis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pada hakikatnya adalah bentuk usaha peningkatan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik, baik berupa kesejahteraan, kenyamanan, ketentraman, serta untuk menjamin keberlangsungan hidup dan penghidupan di masa akan datang. Pembangunan bukan hanya sebagai usaha sebagai usaha untuk membangun suatu daerah semata, akan lebih kepada proses untuk mengoptimalkan masyarakat demi kesejahteraan pembangunan juga mempunyai makna substansi, yakni makna etika, hukum, serta ajaran agama baik dalam tujuan yang diinginkan setiap orang maupun tujuan kolektif untuk pembangunan Nasional. Oleh karena itu bukan hanya semata tujuan dari pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Akan tetapi ajaran-ajaran atau nilai-nilai tersebut harus melekat dalam proses tahap pembangunan, makna pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik, atau merusak kemanusiaan.⁴

Oleh karena itu, disinilah pentingnya peran pemerintah baik dari tingkat yang paling atas hingga paling rendah pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan umum. Dalam Undang-

⁴ Machsun Husain, *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers 1989),1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 79 Ayat(1) disebutkan bahwa:

Pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka. Mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Di dalam PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa meliputi beberapa bidang,⁵ diantaranya yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Peamberdayaan Masyarakat

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶

⁵ Peraturan Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 6

⁶ Ibid, pasal 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dari informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup :⁷

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Organisasi dan tata laksana pemerintah desa
3. Keuangan desa
4. Profil desa
5. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Kepemimpinan merupakan fundamental dalam kehidupan. Selain itu juga kepemimpinan atau pemimpin diidentikkan dengan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Kepemimpinan merupakan sosok yang memberikan perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakatnya. Untuk itulah pemimpin diharuskan menjadi teladan moral bagi masyarakat.

Tiga implikasi penting dari proses mengarahkan dan mempengaruhi dalam kepemimpinan adalah : *Pertama*, kepemimpinan melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut. *Kedua*, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, dan ketiga adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk

⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan yang berbeda untuk mengikuti tingkah laku pengikutnya.⁸ Dengan tiga implikasi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan tanggung jawab besar dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya aktivitas menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah SWT dengan mengerjakan perbuatan atau bertingkah laku yang diridhai oleh Allah SWT.

Seorang pemimpin harus menjaga hak-hak rakyat dan merealisasikan kemaslahatan serta kemakmuran di antara masyarakat secara keseluruhan tanpa terkecuali. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) : 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*

Fiqh siyasah juga membahas hubungan antara rakyat dan pemimpinnya dalam ruang lingkup nasional maupun internasional tertang

⁸ Maimunah, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya”, Jurnal Al-Afkar, Volume V No. 1, April, 2017, hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berbagai kebijakan. Kaidah fiqh mengenai fiqh siyasah yang dapat menjelaskan persoalan terkait kebijakan dapat dinyatakan sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِإِمْصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah fiqh di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam kebijakannya harus berorientasi untuk kemaslahatan, kesejahteraan, keamanan rakyat, dan tidak mengikuti keinginan dan kepentingan dirinya, keluarganya atau kelompoknya.

Kepemimpinan Islam tecermin sebagaimana ajaran Islam dapat memberikan corak dan arah kepada pemimpin.⁹ Corak inilah yang membuat seorang pemimpin dalam menjalankan amanahnya mampu mengayomi dan melindungi martabat masyarakat.

Di Kampung Minas Timur perencanaan pembangunan yang terdapat di dalam RPJM Desa RKP Desa hanya terfokus kepada penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang bersifat komsumtif. Sedangkan pembinaan dan pemberdayaan untuk masyarakat masih lemah.

Pelaksanaan dari pada pembangunan desa di desa Minas Timur hanya terfokus kepada pembangunan fisik seperti jalan, sumur bor dan lainnya, sedangkan di dalam PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 pembangunan desa memiliki beberapa aspek yang harus dilakukan dalam hal pembangunan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan.

⁹ Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah”, Jurnal Al- Bayan Volume 22 Nomor 33 Januari-Juni, 2016, hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian permasalahan selanjutnya kurang maksimalnya pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Semua itu dapat dilihat dari agenda program yang dilakukan oleh pemerintahan desa sebagaimana yang tercantum di dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

Sehubungan dengan permasalahan sosial diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah terkait dengan judul: **TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 114 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA** (Study Kasus Di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak).

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini mencapai sasaran dan terarah, maka perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian ini, yakni pelaksanaan pembangunan desa Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Tahun 2018-2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Orientasi Pembangunan Desa Menurut PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Berdasarkan PERMENDAGRI No. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak?

3. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam Persepektif *Fiqih Siyasah*?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Orientasi Pembangunan Desa Menurut PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014
- b. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Berdasarkan PERMENDAGRI No 114 Tentang Pembangunan Desa.
- c. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam Persepektif *Fiqih Siyasah*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Bagi peneliti disamping untuk melengkapi persyaratan mendapat gelar sarjana SI di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini di bangku kuliah dalam praktek yang terjadi di lapangan.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparatatur Pemerintahan Desa Kampung Minas Timur Kecamatan Minas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Siak dalam menjalankan roda pemerintahan serta dilihat dari aspek fiqih siyasah.

- c. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penulis lainnya yang juga berminat dalam bidang yang sama.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field Research*) yang berlokasi di Kampung Minas timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena penulis sendiri tinggal di desa tersebut sehingga memudahkan dari segi pembiayaan dan waktu

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat Desa, dan yang menjadi Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa.

3. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu:¹⁰

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian.¹¹ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap buku-buku, perundang-undangan dan sumber lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa yaitu 1 Kepala Desa dan 1 Sekretaris Desa (Kerani), Badan Permusyawaratan Desa yaitu 1 Ketua BPD dan 1 anggota BPD serta warga masyarakat berjumlah 4.573 orang Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

¹¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, hlm. 87.

¹² Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 122.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹³ Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suhaimi, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Penelitian ini mengambil sampelnya sebanyak 45 orang; alasan penulis adalah karena 4573 orang tidak mungkin dijadikan sampel semuanya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *accidental sampling* yaitu peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang kebetulan ditemui.

Sampel dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Ketua Badan Permusyawaratan Desa, 1 Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan 45 orang masyarakat Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara, yaitu melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

¹³ Ibid, h. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.¹⁴
- c. Dokumentasi adalah Penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, jurnal, peraturan, dan dokumen seperti laporan Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM).
- d. Studi Pustaka, yaitu dengan memperbanyak sumber-sumber dari buku-buku bacaan untuk menuntaskan masalah yang diteliti oleh penulis.

6. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian di analisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Deskriptif, yang menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan pendahuluanya yang terdiri dari latar Belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penlitian dan sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum tentang lokasi penelitian, priodesasi pembangunan, dan tinjaun siyasah dusturiyyah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Pembangunan Desa dan Fiqih Siyasah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab inti yang membahas tentang Orientasi Pembangunan Desa Menurut PERMANDEGRI Nomor 114 Tahun 2014, Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Berdasarkan PERMANDEGRI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam Persefektif Siyasah.

BAB V : Bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari penulis yang terkait.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KAMPUNG MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK

A. Sejarah Kampung Minas Timur Kecamatan Minas

Kampung Minas Timur merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang sebelum diberlakukan otonomi daerah masuk kedalam Kabupaten Bengkalis. Setelah diberlakukan otonomi daerah, maka diadakan pemekaran Kabupaten Bengkalis yang mana Siak menjadi kabupaten baru dari pemekaran tersebut. Kabupaten Siak terdiri dari beberapa kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Minas yang mencakup Kampung Minas Timur, Minas Barat, Kandis, Sam-Sam, Belutu, Rantau Bertuah dan Mandi Angin.¹⁵

Sehubungan dengan perkembangan daerah Kabupaten Siak, dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang didalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.¹⁶

Berkaitan dengan hal tersebut dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya dan meningkatkan bebas tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di masing- masing Desa tersebut dipandang perlu membentuk kelurahan dengan memekarkan Kampung Minas Timur

¹⁵ Sovia Dewi, (Kaur Pemerintahan Kampung Minas Timur), wawancara, tanggal 31-09-2017, jam 10.30 WIB.

¹⁶ Dokumentasi, RPJMDES, 2011-2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 39 tahun 2002 tentang pembentukan Kelurahan Minas Jaya, Kelurahan Simpang Belutu, Kelurahan Telaga Sam-sam, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Minas dan kecamatan tualang dan pemekaran kecamatan Minas menjadi Kecamatan sungai Mandau pada tahun 2001 dan dimekarkan lagi menjadi Kecamatan Kandis sesuai Peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 41 tahun 2002. Dengan demikian kampung Minas Timur yang sekarang adalah Desa induk dari pemekaran kelurahan Minas Jaya.

Dengan Kampung Minas timur merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Minas Kabupaten Siak di Provinsi Riau dengan luas wilayah 96 KM², dengan tomografi dataran berbukit. Iklim Kampung Minas Timur, sebagaimana kampung-kampung lain di Indonesia beriklim tropis yang mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

B. Visi dan Misi Kampung Minas Timur

1. VISI :

Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Dan Memajukan Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Serta Kesejahteraan Masyarakat, Serta Menjadikan Kampung Beserta Masyarakat Yang Sakinah.

2. MISI :

Memberikan Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Cermat Kepada Masyarakat

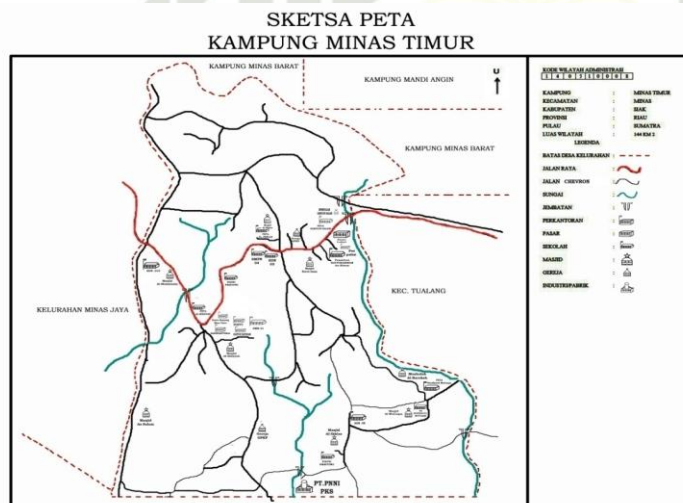
- a. Menciptakan Transparansi Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kepada Masyarakat
- b. Meningkatkan Kinerja Aparatur Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab

- c. Mewujudkan Pembangunan Kampung Yang Merata Dan Bertahap
- d. Menciptakan Masyarakat Yang Beriman Dan Bertaqwa Dengan Menanamkan Kejujuran Bermasyarakat

C. Geografis Kampung Minas Timur

Kampung minas timur berbatasan dengan :

- | | | |
|-----------------|------------------|------------------------|
| Sebelah Utara | Bebatasan dengan | : Kampung Minas Barat |
| Sebelah Selatan | Bebatasan dengan | : Kota Pekanbaru |
| Sebelah Timur | Bebatasan dengan | : Kecamatan Tualang |
| Sebelah Barat | Bebatasan dengan | : Kelurahan Minas Jaya |



- | | |
|----------------------------------|-------------|
| Luas Wilayah Kampung Minas Timur | : 144 Km |
| Pemukiman Penduduk | : 275 ha |
| Perkebunan Sawit | : 13.800 ha |
| Fasilitas umum (Perkantoran) | : 12 ha |
| Pemakaman | : 10 ha |
| Pasar | : 1 ha |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sarana Jalan : 50 ha
 Kas Kampung : 10 ha
 Sarana Umum : 10 ha
 Jarak Kampung Ke

Ke Kecamatan	15 Km
Ke Kabupaten / kota	70 Km
Ke Provinsi	35 Km

D. Pemerintahan Kampung Minas Timur

Kampung Minas Timur Terdiri dari : 3 Dusun 8 RW 23 RT

1. Dusun Lukut
 - a. RW 1 Terdiri dari 4 RT
 - b. RW II Terdiri dari 4 RT
 - c. RW III Terdiri dari 2 RT
 - d. RW IV Terdiri dari 3 RT
2. Dusun Ukai
 - a. RW 1 Terdiri dari 3 RT
 - b. RW II Terdiri dari 3 RT
 - c. RW III Terdiri dari 2 RT
3. Dusun Leko
 - a. RW 1 Terdiri dari 3 RT

E. Keadaan Sosial Kampung Minas Timur

Penduduk Kampung Minas Timur didominasi oleh penduduk asli yang bersuku melayu dan pendatang yang bersuku Jawa, Minang, Batak, dan suku lainnya. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya kampung Minas Timur.

Tabel II.1
Jumlah Penduduk

No	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk Desa Minas Timur	Jumlah Kartu Keluarga (KK)
1	2.110	2.463	4.573	959

Sumber data : Dokumentasi Kampung Minas Timur

Kampung Minas Timur mempunyai jumlah penduduk 4.575 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.110 jiwa, dan perempuan 2.463 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 959 KK.

Pertumbuhan penduduk kampung Minas Timur terbilang lambat dikarenakan keseimbangan antara kelahiran dan kematian dan juga perpindahan.

Tabel II.2
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tidak Bersekolah/Pra Sekolah	1.060
2	Sekolah Dasar/Madrasah	1.709
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	673
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	975
5	Pasca Sarja/Strata 1 (SI)	156
	Jumlah	4.573

Sumber daya manusia (SDM) dipengaruhi oleh tinggi atau tidaknya tingkat pendidikan, sehingga pihaknya terus mendorong perkembangan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia, sehingga hal ini akan berimplikasi pada semakin majunya perkembangan bangsa dan negara. Pendidikan, formal maupun nonformal merupakan sarana untuk membentuk manusia yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

terampil dan produktif, sehingga hal itu akan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Cara yang dilakukan diantaranya dengan mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidikan

Keadaan pendidikan masyarakat Kampung Minas Timur semakin membaik karena antusias dari pada orang tua yang menginginkan agar keadaan pendidikan anak mereka tidak sama dengan orang tuanya dimana mereka banyak yang tidak merasakan berada di bangku sekolah. Kemudian tuntutan perekonomian juga membuat orang tua semakin untuk menyekolahkan anak-anak mereka dimana untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, minimal lulusan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

**Tabel II.3
Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	32
2	Guru	56
3	TKI	-
4	Pertanian	993
5	Industri	8
6	Perdagangan	95
7	Jasa Lainnya	20
8	Tidak Bekerja	512
	Jumlah	1.716

Sumber data: Dokumentasi RPJMDES,

Kampung Minas Timur, sebagian besar penduduknya lebih cenderung bekerja pada sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat pada Tabel diatas, bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

993 orang angka yang tertinggi dibandingkan jenis pekerjaan pada sektor lain, kemudian diikuti dengan jumlah pengangguran yang tidak sedikit, yaitu 512 orang. Pada hal yang demikian, maka penduduk Kampung Minas Timur perlu meningkatkan taraf pendidikan dan bila perlu pelatihan-pelatihan kerja. Baik pada sektor pertanian, industri, dan lain sebagainya.

F. Kelembagaan yang ada di Kampung Minas Timur

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) : 20 Orang Anggota
2. PKK Kampung Minas Timur : 38 Orang Anggota
3. Linmas / Hansip Kelurahan : 6 Orang Anggota
4. Karang Taruna : 25 Orang Anggota
5. Bapekam : 11 Orang Anggota

1. Bidang Kemasyarakatan

Budaya masyarakat Kampung Minas Timur masih menjunjung tinggi budaya gotong royong. Ini terbukti dengan adanya tingkat partisipasi masyarakat dalam hal gotong royong baik itu dalam bentuk fisik (bangunan) maupun dalam bentuk dana swadaya. Pemikiran dan semangat yang besar, bahu membahu, hal ini timbul dan menjadi budaya dalam masyarakat. Sumbangan-sumbangan kecil seperti ini akan menjadi tonggak besar pada nantinya. Suatu kegiatan masyarakat tidak perlu menggerakkan sesuatu yang besar cukup melakukan yang terkecil dan sederhana. Begitupun dengan masyarakat sosial, kuncinya menyusun tatanan masyarakat yang telah ada dan menjadi wadah yang bermartabat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan manfaat bagi antar sesama, membenahi yang kurang sempurna sehingga menjadi lebih tertata.

Sebagai lembaga kemasyarakatan , LPM dan Bapekam sebagai media Komunikasi Informasi Sosialisasi antara pemerintahan Kampung dan masyarakat telah melaksanakan kegiatan – kegiatan yang bersifat ;

a. Menggerakkan partisipasi gotong royong masyarakat, mengadakan kegiatan sosial dengan :

- 1) Membuat pos ronda
- 2) Membangun mesjid
- 3) Membuat lapangan olahraga
- 4) Melakukan kegiatan dalam peringatan hari besar Islam
- 5) Pembangunan rumah ibadah , dll

Disamping itu ikut menyelesaikan sengketa antar masyarakat, antara lain :

- 1) Permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan lingkungan, seperti masalah pipa minyak Chevron yang bocor dan mengganggu lahan perkebunan masyarakat.
- 2) Permasalahan yang terjadi karena adanya sengketa tanah antara seseorang dengan pihak sempadan yang penyelesaiannya meminta bantuan ke Kepenghuluan dan Lembaga Masyarakat dalam penyelesaian.

b. Dalam hal peningkatan lingkungan :

- 1) Melestarikan lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan
- 3) Penyuluhan Narkoba
- 4) Penyuluhan Reproduksi remaja
- 5) Lomba Kader Posyandu
- 6) Lomba Balita
- 7) Lomba makanan sehat dan bergizi / Non Beras

2. Bidang Pembangunan

Dibidang Pembangunan Kampung Minas Timur untuk tahun Anggaran 2018 Alokasi dana yang bersumber dari Dana Desa/APBN dialokasikan ke Pembangunan :

- a. Jalan Semenisasi terlealisasi sepanjang 355 Meter
- b. Box Culvert sebanyak 5 Unit
- c. Pembangunan Tempat Pendidikan Al-Qur'an 1 unit
- d. Pembangunan Pos Ronda
- e. Pembangunan Drainase
- f. Pelebaran Dan Perbaikan jalan linker Gudang sepanjang 2500 Meter

3. Bidang Keamanan dan Ketertiban

Di Bidang keamanan dan ketertiban Kampung Minas Timur telah dibentuk pengamanan Kampung seperti Kelompok Ronda Siskamling, dengan jumlah sarana berupa pos-pos jaga yang kegiatannya di koordinir langsung oleh Penghulu Kampung dan Babinkantibmas. Di Kampung Minas Timur terdapat 7 pos kamling dengan jadwal dan kegiatan ronda diatur oleh ketua pos masing – masing. Dengan cara setiap malam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan 4 orang masyarakat yang melaksanakan ronda dan apabila ada yang berhalangan hadir hendaknya melaporkan kepada ketua dengan mencari pengganti.

Peranan Kepenghuluan terhadap pembangunan pos ronda sangat baik sekali dengan adanya swadaya masyarakat dengan cara gotong royong.

Dengan adanya kegiatan rutin tersebut tingkat keamanan dan ketertiban dalam wilayah Kampung Minas Timur dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tingkat pelanggaran keamanan dan ketertiban yang hampir tidak ada atau nihil.

4. Bidang Ekonomi Kemasyarakatan

Kampung Minas Timur merupakan kawasan perkebunan kelapa sawit, dimana komoditi ini sebagai penghasil utama warga Kampung, disamping itu tidak sedikit jumlah warga yang mengusahakan pada sektor pertanian seperti petani palawija dan hortikultura, serta perdagangan Jasa dan lain-lainnya.

Kelembagaan ekonomi yang ada di Kampung Minas Timur antara Lain :

- a. UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) yang merupakan usaha rumahan yang dijalankan oleh ibu-ibu sebagai suatu kegiatan penambahan penghasilan keluarga. pada tahun 2014 terdapat 5 kelompok UP2K dimana masing masing Kelompok dibantu dana usaha sebesar Rp.3.000.000,-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. UED SP "Sukses Bersama" yang dimulai pada tahun 2011 sekarang telah menjadi BUMKam dengan modal Awal sebesar Rp.500.000.000,- sampai Bulan Desember 2015 menjadi ± Rp.3.340.000.000,- hingga sekarang, dengan tunggakan NIHIL

Adapun data pemanfaat dari UED – SP sebagai berikut :

No	Jenis Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pertanian	35 orang	49 orang
2	Perdagangan	8 orang	7 orang
3	Perkebunan	54 orang	60 orang

Kelembagaan Ekonomi yang ada di Kampung Minas Timur

No	Kelembagaan Ekonomi	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pasar	1 Unit	1 Unit
2	Toko/Kios	45 Unit	45 Unit
3	Warung Makan	25 Unit	25 Unit
4	UP2K	5 Klp	5 klp

5. Bidang Sosial, Budaya dan Agama

Dalam bidang sosial Kampung Minas Timur sering melaksanakan penyuluhan kesehatan dengan Puskesmas dan psutu serta Polindes yang ada diwilayah Kampung. Pelaksanaan kesehatan Ibu dan Anak dengan kegiatan posyandu yang dilaksanakan 1 kali sebulan dengan jumlah tiga posyandu dan satu posyandu lansia. Untuk kegiatan remaja pelaksanaan sosialisasi tentang bahaya narkoba, HIV yang dilaksanakan di sekolah dengan mengikut sertakan BABINKANTIBMAS, OKK, LPM, dan toko masyarakat.

Dibidang agama kegiaatn ibu-ibu kampung Minas Timur membentuk kelompok kegiatan wirid, kesenian rebana, Majelis Ta'lim

serta mengadakan pelaksanaan kegiatan hari besar Islam seperti: tahun baru Hijriyah, memperingati Maulid Nabi, dan mengikuti lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kecamatan dengan meraih juara umum taun 2017.

6. Adat Istiadat dan Tata Cara Pernikahan

Di kampung Minas Timur mayoritas penduduknya adalah melayu. Adapun yang menjadi adat istiadat dan tata cara perkawinannya adalah sebagai berikut:

a. Prosesi sebelum Perkawinan

Prosesi sebelum pelaksanaan perkawinan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu;

- 1) Merisik (untuk menyelidiki tentang keberadaan seorang calon penganten baik yang bersifat jasmani (bentuk muka, rambut, kulit, mata, keturunan, keterampilan menekak, menyulam, memasak, budi bahasa dan lain-lain) dan yang bersifat rohani (kelakuannya, pengetahuan agamanya, sifat, watak, dan lain-lain. Dan biasanya dilakukan pada malam hari selepas maghrib).
- 2) Meminang (Memberitahukan tanggal, hari dan jam kedatangan rombongan kepada pihak perempuan, Rombongan pihak laki-laki terdiri sanak keluarga, orang tua-tua, tetangga, dan seorang juru bicara atau pemantun, Berpakaian teluk belanga, kebaya labuh, berpenampilan rapi dan sopan).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Antar tanda (menyerahkan tanda kepada pihak perempuan sebagai bukti tanda pertunangan. Pelaksanaannya di rumah orang tua perempuan waktunya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak).
- 4) Antar belanja (menyerahkan uang belanja dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang gotong-royong dan kebersamaan untuk membantu pihak perempuan dalam melaksanakan perhelatan perkawinan kedua anak mereka).

b. Prosesi Pelaksanaan Perkawinan

Prosesi yang kedua adalah prosesi pelaksanaan perkawinan, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menegakan bangsal (untuk tempat menampung tamu undangan atau jemputan yang dilakukan oleh karib-kerabat, dan sanak saudara, secara bergotong royong).
- 2) Menggantung-gantung (memasang atau menggantung alat hiasan dan perhiasan gerai atau pelaminan serta menggantung tabir yang berwarna merah, kuning dan hijau).
- 3) Berinai curi (melekatkan inai pada kuku tangan, kuku kaki, telapak tangan, telapak kaki pengantin yang dilakukan pada malam hari).
- 4) Ijab kabul (Upacara ini adalah upacara agama dan adat yang dilaksanakan secara sakral di rumah pengantin perempuan).
- 5) Tepuk tepung tawar (salah satu rangkaian adat setelah upacara akad nikah.).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Berkhatam al-Qur'an (Upacara berkatham al-Qur'an dilaksanakan di rumah pengantin perempuan pada pagi hari sekitar jam 08.00-10.00 wib pagi oleh pengantin perempuan dan biasanya juga diikuti oleh adik-adiknya).
- 7) Hari langsung (Upacara hari langsung disebut juga dengan upacara bersanding dan dilaksanakan setelah shalat zuhur di rumah pengantin perempuan).

7. Sarana dan Prasarana

Kampung Minas Timur memiliki potensi yang hampir sama dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana seperti desa lain pada umumnya. Akan tetapi, Kampung Minas Timur memiliki aksesibilitas yang cukup strategis karena letak desa yang berada atau sangat dekat dengan jalur perlintasan antar kota serta tidak begitu jauh dengan pusat kota Madya Riau, yakni Pekanbaru.¹⁷ Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan survei yang penulis lakukan, masyarakat desa pada umumnya menyatakan mereka merasakan kemudahan dalam aksesibilitas di Kampung Minas Timur, Karena terletak di jalur antar-kota maka memudahkan masyarakat desa untuk mengakses sarana dan prasarana baik yang terdapat di Kampung Minas Timur itu sendiri ataupun sarana dan prasarana lain yang ada di Kecamatan Minas ataupun Kabupaten Siak.

¹⁷ Selamat, (Kadus Desa Minas Timur), wawancara, tanggal 31-09-2017, jam 09.10 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana dan prasarana desa dapat kita lihat sebagai berikut:

a. Kantor Pemerintah Desa

Kampung Minas Timur memiliki sebuah Pemerintahan Desa yang terletak di Jalan Minas Perawang. Memiliki Balai Desa dengan kondisi yang baik. Hal ini dapat dilihat karena Balai Desa ini telah dilengkapi dengan kursi yang cukup untuk melakukan rapat-rapat desa atau pertemuan tingkat desa seperti Rapat Mingguan. Selain itu Balai Desa ini juga telah dilengkapi dengan seperangkat *sound system*. Listrik dan Air bersih juga tersedia walaupun fasilitas telepon belum tersedia di Kantor Desa ini.

Kantor Desa ini juga telah dilengkapi dengan satu buah mesin ketik, dua buah komputer, dan berbagai fasilitas standar kantor lainnya. Informasi mengenai perangkat desa, struktur organisasi, dan buku peta wilayah juga terdapat dalam Kantor Desa ini.

b. Puskesmas dan Posyandu

Di Kampung Minas Timur terdapat sebuah Puskesmas yang terletak di sebelah kantor Desa Minas Timur, walaupun puskesmas ini tidak dilengkapi dengan fasilitas yang sangat canggih, akan tetapi fasilitas yang ada dalam Puskesmas ini dirasa telah cukup, karena pada umumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kampung Minas Timur.

c. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana pendidikan yang terdapat di Kampung Minas Timur terdiri dari 2 buah TK, 3 buah MI/TPA, 1 buah SD, 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buah SMPN, 1 buah MTS, 1 buah SMK, sehingga pelajar yang ingin melanjutkan sekolah menengah atas tidak perlu jauh-jauh keluar desa karena sudah ada sekolah yang unggul yang mendidik manusia yang siap bekerja ketika selesai sekolah.

d. Sarana air bersih

Dalam hal Sumber Air bersih, sesuai dengan data yang didapatkan dari pendataan Profil Kampung Minas Timur, masyarakat desa mendapatkan air bersih dari mata air, sumur gali dan sumur bor, sumber air bersih tersebut dapat digolongkan secara umum dalam kondisi yang baik. Walaupun beberapa warga juga mengakui bahwa pada musim kemarau, ada kalanya air terkadang sulit didapatkan.

e. Sarana Ibadah

Kampung Minas Timur memiliki 5 Masjid dan 3 Mushola. Masjid dan mushola ini menjadi tempat dimana masyarakat Minas Timur memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

- 1) Megajukan rancangan peraturan Desa.
- 2) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 4) Membina perekonomian Desa
- 5) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 6) Mewakili kuasanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Sekretaris Daerah

Sekretaris Desa memiliki tugas dan fungsi yakni:

- 1) Membantu kepala desa dibidang administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah desa.
 - 2) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan,
 - 3) Melaksnaakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara.
 - 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya
- Sekretraris desa membawahi langsung kepada sub urusan di samping berfungsi juga mengkoordinasikan tugas-tugas kepala urusan dan kepala dusun. Penekanan fungsi ganda sekretaris desa setara dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil.

g. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Ketentuan yang pertama keanggotaannya bersifat menunjukkan yang kemudian dimusyawarahkan untuk persetujuan bersama. Sedangkan ketentuan yang kedua kenaggotannya merupakan hasil pemilihan oleh dan dari penduduk desa. Ketentuan pertama bernuansa kekeluargaan, dan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua bernuansa demokratis. Kedua-duanya sama-sama baik, akan tetapi yang terakhir lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.

h. Kaur Umum

Kaur Umum mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris desa dibidang:

- 1) Mengelola administrasi umum pemerintah desa
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat menyurat.
- 3) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor.
- 4) Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor.
- 5) Mengumpulkan, menyusun, dan menyiapkan bahan rapat.
- 6) Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga pemerintah desa. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

i. Kaur pemerintahan

Kaur Pemerintahan mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris desa dibidang:

- 1) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- 2) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukun tetangga serta masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan kepala desa dan kegiatan sosial politik.
- 4) Melaksanakan tugas dibidang pertanahan.
- 5) Melakukan administrasi peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

j. Kaur Pembangunan

Kaur pembangunan mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris desa dibidang

- 1) Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang ekonomi dan pembangunan.
- 2) Menghimpun data potensi didesanya serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan.
- 3) Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya.
- 4) Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuatan daftar usulan rencana dan proyek, daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek maupun daftar isian kegiatan.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

8. Proses Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Pelaksanaan Pembangunan Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dalam kurun waktu 5 (tahun) yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2019-2021 melaksanakan program dan kegiatan yang disusun, yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Prpgram Pemberdayaan Masyarakat, yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan dan pemberian bantuan operasinsal kepada lembaga kemasyarakatan, antara lain :
 - 1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa meliputi : kelompok-kelompok PKKK (PKK Dusun, RT dan RW), Posyandu.
 - 2) Lembaga Kemasyarakatan /Organisasi Kepemudaan Desa (seperti : RT/RW, Karang Taruna dll).
 - 3) Kegiatan Muusrenbang Tingkat Desa.
 - 4) Kegiatan perlombaan pelaksanaan program PKK
 - 5) Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.
- b. Program Pemberdayaan Lingkungan, meliputi kegiatan pembangunan, pengadaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana fisik desa, antara lain :
 - 1) Pembangunan dan Pemeliharaan jalan desa
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan jembatan umum
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air bersih
 - 4) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana desa
- c. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, meliputi kegiatan bantuan untuk menunjang kegiatan pemberdayaan ekonomi yang antara lain di gunakan untuk kegiatan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan atau Pasar Desa
- 2) Peningkatan Usaha Ekonomi Desa (UED) Simpan Pinjam
- 3) Kerjasama antar Desa maupun dengan pihak ketiga yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli desa
- 4) Pengembangan lumbung desa

Prioritas dan kegiatan yang telah selesai di laksanakan bidang pembangunan Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa
 - a) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staff Desa
 - b) Tunjangan Kesehatan BPJS
 - c) Operasional Perkantoran
 - d) Operasional BPD
 - e) Operasional RT/RW
 - f) Operasional LPM
 - g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - h) Hari Besar Nasional
 - i) Hari Besar Keagamaan
 - j) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
 - k) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes
 - l) Pertanggung Jawaban APBDes

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bidang Pembangunan Desa
 - a) Pembangunan Jalan Semensasi
 - b) Pembangunan Gedung PKK
 - c) Pembangunan Gedung LPTQ
 - d) Pembangunan Polindes
 - e) Pembangunan sekolah TK
 - f) Pembangunan Gedung MDA
 - g) Pembangunan Los Pasar
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a) Honor Guru Ngaji
 - b) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
 - c) Fasilitas Penyelenggaraan PKK Desa
 - d) Pembinaan PKK
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a) Musrenbang Desa
 - b) RKP Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Persepektif Fiqih Siyasah

1. Profil Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

Pembangunan Desa di Indonesia secara keseluruhan masih lemah dari berbagai aspek pembangunan, baik aspek bantuan dan dukungan moril, politik, teknologi maupun pendanaan.¹⁸ Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat secara partisipatif. Padahal partisipasi dari masyarakat sangatlah penting dalam menentukan perencanaan pembangunan Desa, namun sering kali terjadi adalah tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. Persoalan yang sangat bertentangan dalam prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif dan komunikatif. Desa yang sejatinya merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional ternyata masih terdapat problem atau masalah sosial, ekonomi dan politik yang sejatinya harus dibenahi dengan sebuah konsep yang dapat menaungi dan memberikan perubahan yang baik terhadap pembangunan Desa.

¹⁸ Wasistono Sadu dan Tahir Irawan, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: Forum Media), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan Peraturan Daerah di perlukan sebagai dasar penyelesaian masalah sehingga pemerintahan Desa memiliki landasan dan kepastian dalam penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa dan bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan membimbing pemerintahan Desa. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah :¹⁹

- a. Pertimbangan filosofis, bahwa Pemerintahan Kota perlu memberikan pedoman kepada desa dalam menyusun struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dapat mengarahkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa pada upaya berperan serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. Pertimbangan Sosiologis, yakni adanya kebutuhan untuk menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- c. Pertimbangan Yuridis, bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pemerintah Desa dalam menyusun struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa, perlu adanya pedoman penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa.

¹⁹ <http://simdos.unud.ac.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Butuh perencanaan pembangunan yang baik agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Desa. Untuk memberikan acuan dalam perencanaan pembangunan desa ke arah yang lebih baik, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dikeluarkan pemerintah sebagai upaya percepatan pembangunan Desa diantaranya Undang-Undang No. 25/2004 tentang SPPN, Permandagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai turunannya yakni PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan kemudian menetapkan Permandagri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan di Desa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6/2014. Kesemua aturan tersebut, merupakan acuan atau pedoman yang harus digunakan dalam perencanaan pembangunan di tingkat Desa. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat Desa setempat, diharapkan Desa yang sekarang ini semakin memberikan peranan penting dalam pembangunan Nasional.

2. Konsep Pembangunan Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

Pembangunan berasal dari kata "bangun", diberi awalan "pem" dan akhiran "an", guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidak-tidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam anti sadar atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi pula segi anatomik (bentuk), fisiologik (kehidupan) dan behavioral (perilaku).²⁰

Menurut Tjokroamidjojo pembangunan adalah "usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap".²¹ Menurut Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).²²

Sedangkan menurut Nugroho inti dari pembangunan pada dasarnya adalah pergerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah mengatakan bahwa negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin. Kemiskinan mempunyai pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tugas pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan. Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa inti pembangunan adalah menggerakkan ekonomi agar rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak berada dalam kemiskinan. Dalam bahasa politis disebut sebagai "menggerakkan ekonomi rakyat".²³

²⁰ Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2009, h. 132

²¹ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Penibangunan*, (Jakarta: LP3ES), 2001, h. 1

²² Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial*..., 31

²³ Setiadi Nugroho, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana), 2013, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.²⁴

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan Desa adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa bagian kesatu umum menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 pasal 52 adalah :²⁵

²⁴ Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),

²⁵ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
 - 2) Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa
- c. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- d. Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Kemudian Pasal 53 menjelaskan bahwa:

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sector dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati/walikota melalui camat.

Lebih lanjut lagi Pasal 54 menerangkan:

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahapan persiapan diatur dalam Pasal 55 yang meliputi:

- (1) Penetapan pelaksana kegiatan;
- (2) Penyusunan rencana kerja;
- (3) Sosialisasi kegiatan;
- (4) Pembekalan pelaksana kegiatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (5) Penyiapan dokumen administrasi;
- (6) Pengadaan tenaga kerja; dan
- (7) Pengadaan bahan/material.

Selanjutnya berkenaan dengan Penetapan Pelaksana Kegiatan diatur dalam

Pasal 56 yang berbunyi:

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6²⁶

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - (a) Penetapan dan penegasan batas Desa
 - (b) Pendataan Desa
 - (c) Penyusunan tata ruang Desa
 - (d) Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - (e) Pengelolaan informasi Desa
 - (f) Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - (g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - (h) Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - (i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - (j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 - (a) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Tambatan perahu
 2. Jalan pemukiman
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 5. Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (b) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (c) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat
 2. Pendidikan anak usia dini
 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (d) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
 1. Pasar Desa
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 3. Penguatan permodalan BUM Desa
 4. Pembibitan tanaman pangan
 5. Penggilingan padi
 6. Lumbung Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pembukaan lahan pertanian
 8. Pengelolaan usaha hutan Desa
 9. Kolam ikan dan pembenihan ikan
 10. Kapal penangkap ikan
 11. Cold storage (gudang pendingin)
 12. Tempat pelelangan ikan
 13. Tambak garam
 14. Kandang ternak
 15. Instalasi biogas
 16. Mesin pakan ternak
 17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- (e) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan
 2. Pembuatan terasering
 3. Pemeliharaan hutan bakau
 4. Perlindungan mata air
 5. Pembersihan daerah aliran sungai
 6. Perlindungan terumbu karang; dan
 7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- (a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - (b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - (c) Pembinaan kerukunan umat beragama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (d) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - (e) Pembinaan lembaga adat
 - (f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - (g) Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- (a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
 - (b) Pelatihan teknologi tepat guna
 - (c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa
 - (d) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa
 2. Kelompok usaha ekonomi produktif
 3. Kelompok perempuan
 4. Kelompok tani
 5. Kelompok masyarakat miskin
 6. Kelompok nelayan
 7. Kelompok pengrajin
 8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 9. Kelompok pemuda; dan
 10. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

3. Pembangunan Menurut Fiqh Siyasah

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alqur'an dan sunnah. Kedua sumber tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level.

Nabi Muhammad Saw Sebagai Rasulullah dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan.

من كان يومه خيرا من اسمه فهو راجح, و من كان يومه مثل أمسه فهو مغبون.
“barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi”.

Pembangunan bangsa (*nation building*) seperti yang telah dikemukakan di atas juga sudah dibicarakan didalam potongan Alqur'an dijelaskan surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: *“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.* (Q.S Ar-Ra'd: 11)

Dan ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.²⁷

Pembangunan perdesaan merupakan bagian dari pembangunan sosial ekonomi secara keseluruhan. Akses masyarakat terhadap sumber daya dipengaruhi oleh sistem ekonomi, sosial, dan politik yang ada. Pembangunan merupakan suatu sistem perubahan sosial yang saling berkaitan satu sama lain. Pembangunan merupakan suatu proses yang dihasilkan dari pemanduan berbagai elemen yaitu yang didasarkan pada sistem nilai yang ada, sumber daya alam maupun manusia, teknologi yang tersedia, dan berbagai bentuk organisasi sosial dan politik. Jika salah satu elemen berubah maka keseluruhan sistem akan berubah pula.

Konsep pemerintahan Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam nash Al-Qur'an, yakni pada surat an-nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah dan Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul Sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

²⁷ Wibawa, Samudra, *Administrasi Negara; Isu-isu Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa pemerintahan Islam berdasarkan kepada tiga aturan penting yakni taat kepada Allah dan Rasulnya, taat yang memegang kekuasaan diantara umat dan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa.

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Sebagaimana kaidah Fiqh Siyasah menjelaskan persoalan terkait kebijakan dapat dinyatakan sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah fiqih di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam kebijakannya harus berorientasi untuk kemaslahatan, kesejahteraan, keamanan rakyat, dan tidak mengikuti keinginan dan kepentingan dirinya, keluarganya atau kelompoknya. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan elemen masyarakat maka kebijakan pemimpin dalam pembangunan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat sendiri. Sederhananya, pemimpin mengambil suatu kebijakan yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain sebagai sarana mencapai kemaslahatan atas kebijakan pemimpin, musyawarah perencanaan pembangunan juga menjadi sarana dalam hubungan antara rakyat dan pemimpinnya dalam upaya mencapai tujuan negara yang mashlahah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya aktivitas menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah SWT dengan mengerjakan perbuatan atau bertingkah laku yang diridhoi oleh Allah SWT. Kepemimpinan Islam tercermin sebagaimana ajaran Islam dapat memberikan corak dan arah kepada pemimpin. Corak inilah yang membuat seorang pemimpin dalam menjalankan amanahnya mampu mengayomi dan melindungi martabat masyarakat

Bentuk prinsip pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam alqur'an dan dijelaskan sunnah Nabawy, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, mu'amalah maupun sebagai macam hubungan. Oleh karena itu hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat (moral dan fisik) serta sejahtera.

Dalam pemerintahan Islam terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b. Prinsip musyawarah
- c. Prinsip keadilan
- d. Prinsip persamaan

- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- f. Prinsip pengadilan bebas (dialog Mu'adz dengan Rasulullah SAW ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman);
- g. Prinsip perdamaian
- h. Prinsip kesejahteraan
- i. Prinsip ketaatan rakyat

Konsep pembangunan dalam Fiqh Siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam Fiqh Siyasah lebih dari itu. Bagi Fiqh Siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam Fiqh Siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan Fiqh Siyasah tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran Filosofis dalam pendekatan Fiqh Siyasah terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut Fiqh Siyasah, yaitu:

- a. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Alloh SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Alloh dan manusia dengan sesamanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. Mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan manusia.
- c. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khalifah itu. Di sini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggungjawab.
- d. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepada para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulan dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan Negaranya.

Berdasarkan keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut Fiqh Siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, Namun juga di akhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah pada satu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah yang tampaknya ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan Fiqh Siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan yang bernafaskan Fiqh Siyasah, tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta menambahkan pengeluaran di jalan Allah. Dengan demikian sebenarnya sendi-sendi ekonomi islam adalah tauhid dan persoudaraan.

Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatulloh fi ardh (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memak murkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat bergantung pada jalan yang dipilihnya.

Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan pada kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik melainkan nonfisik juga seperti pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan dikaitkan dengan aspek moral spiritual.

Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan. Kualitas SDM pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu Desa. Karena itu, pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Di sinilah letak-letak fungsi dan peran Negara, di mana pemerintah sebagai “manager dan pelayan”.

Pembangunan harus mampu memetakan semua potensi SDM dan sumber daya alam (SDA) untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam rentang waktu didunia dan akhirat. Artinya *time line* (skala waktu) pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia tanpa mengorbankan kehidupan akhirat pelaku pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan desa tidak hanya memacu pembangunan fisik saja, maka akan tercabutnya nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang mana masyarakat perlunya pembangunan nonfisik agar masyarakat mendapatkan kemaslahatan dari perencanaan pembangunan desa tersebut seperti pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

B. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata Dusturi ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syara' yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang. Dalam bahasa Indonesia.

Permasalahan dalam Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁹

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi*.....h. 177.

²⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*.....h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa kepemimpinan merupakan amanat khidmat, ini menunjukkan bahwa dalam fungsinya sebagai pemimpin, maka pemimpin di proyeksikan untuk menjadi pelayan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya yang memiliki kewajiban salah satunya yaitu berbuat adil.³⁰ Sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa : 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : “ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil, sungguh, Allah maha baik yang memebri pengajaran kepadamu.” (QS. An-Nina (4) : 58).

Ayat di atas dapat di pahami bahwa salah satu kewajiban dari seorang pemimpin adalah melaksanakan hukum Allah dalam kepemimpinannya. Hal ini didasarkan pada ayat di atas bahwa tidak ada hukum yabg lebih tinggi dan paling sempurna melainkan hanya hukum Allah. Untuk itulah seorang pemimpin haruslah beriman dan bertakwa kepada Allah SWT

³⁰ Mujaer Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah (Doktrin Pemikiran Politik Islam)*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut, ada tiga tugas utama dimainkan oleh negara, yaitu :

- a. Al-Sulthah al-Tasyri'iyah (tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam).
- b. Al-Sulthah al-Tanfidziyyah (berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintahan ini merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan objek tersebut dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang)
- c. Al-Sulthah al-Qadha'iyah (tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif).

Jadi, inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ini juga juga membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundangan. Maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian, materi dalam konstitusi ini sejelas dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Siyâsah Dustûriyah membahas kajian-kajian meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;
- c. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang Waliyul Hadi;
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah;
- f. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidetil dan parlementer;
- g. Kajian tentang pemilihan umum.

Adapun Kaidah fiqih siyasa tentang hak dapat dinyatakan sebagai berikut ialah:

اَهُمْ مَالَنَا وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa terdapat persamaan hak dan kewajiban diantara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral ukhuwah wathaniyah, walaupun berbeda jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan budaya serta kekayaannya. Berkenaan dengan kajian Siyâsah Dustûriyah terdapat prinsip persamaan (musawwah) di mana adanya persamaan hak politik. Persamaan hak politik yang dimaksud.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan Desa yang dilakukan yang dilakukan di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak secara sistematis perumusan dan pembuatan perencanaan sudah sesuai dengan aturan sistematis pelaksanaan pembangunan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa, akan tetapi akan tetapi secara substansi perencanaan pembangunan di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak masih jauh dari harapan pelaksanaan pembangunan.
2. Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Kampung Minas Timur pelaksanaannya sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa hal yang harus dibenahi seperti pembangunan kerohanian, pembangunan moral yaitu pembinaan terhadap pemuda pemudi yang ada di kampung minas timur tersebut. Karena aspek dasar dari majunya suatu negara adalah bagusnya moral generasi muda.
3. Perencanaan Pembangunan dalam Persepektif Fiqih Siyasah meliputi prinsip dan tujuan pembangunan dalam Islam. Prinsip pembangunan dalam Islam terdiri dari tauhid, tazkiyah, mementingkan kemaslahatan umum, dan mengikuti keperluan serta tiada pembaziran. Sedangkan

pembangunan dalam Islam bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, meningkatkan kualitas kehidupan, serta mencapai pembangunan yang seimbang.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa agar lebih baik lagi dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemaslahatan agar berdampak baik terhadap masyarakat, serta pembangunan tersebut juga bukan hanya berorientasi kepada pembangunan fisik saja. Akan tetapi juga pembangunan moral, pembangunan kerohanian dan pembangunan-pembangunan lainnya.
2. Pembangunan yang dilakukan harus bersinergi dan mampu saling menopang demi kemajuan desa, serta pembangunan tersebut merata kepada berbagai aspek masyarakat dan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat dan desa.
3. Peneliti juga berharap dengan hasil penelitian ini maka akan sedikit memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca untuk tetap melakukan penelitian terkait perencanaan pembangunan baik di desa, bahwa perencanaan pembangunan yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang bermanfaat dan berdampak baik kepada masyarakat secara umum.



DAFTAR PUSTAKA

- Atikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, Jakarta: Ummul Qura, 2006
- Adisasmita Rahardjo, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Dewi Sofia, {Kaur Pemerintahan Kampung Minas Timur} , wawancara, tanggal 11-09-2017, jam 10.30 WIB.
- Dokumentasi, RPJMDES, 2011-2015
- Fajar Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Imam al-mawardi, *Al-Ahkam As- Sulthaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, Mesir: Dar al Fikr.
- Irawan Tahir dan Wadu Wasistono, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung : Fokus Media, 2006.
- H.A Rosid, *Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Raja, 2002.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Anas selaku Kepala Desa Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, 2 Juni 2021 Pukul 13.44 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Udir selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, 7 Juni 2021 Pukul 13.20 WIB
- Hasil Wawancara dengan Bapak Samsul Anuar selaku Sekretaris Desa (Kerani) Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak , 15 Juni 2021 Pukul 14.30 WIB
- Hasil Wawancara dengan Bapak Khairul selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, 2 Juni 2021 Pukul 16.20 WIB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Haif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Islam Politik*, Jakarta: Prenamedia, 2011.
- Harsono. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media, 2011.
- Jasuli H. A, *Kaidah-kaidah Fiqih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana Permada Media Group, 2006.
- Husain Machsun, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, 1989.
- Maimunah, *Kepemimpinan Dalam Persepektif Islam dan Konsep Konseptualnya*, Jurnal Al-Afkar. Volume V No 1, April, 2017.
- Naewoko dan Bagong Suyatno, *Sosiologi Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Nugroho Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Samudra, Wibawa, *Administrasi Negara; Isu-isu Kontemporer* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Sakdiah, Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-sifat Rasulullah, Jurnal Al-Bayan Volume 22 Nomor 33 Januari-Juni, 2016.
- Selamat, (Kadus Kampung Minas Timur), Wawancara, 31-09-2017, Pukul 09.10 WIB.
- Sunggono Bambang, *Metedologi Penelitian Hukum*, (akarta: Rajawali Pres, 2009.
- Subagyo Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tjokroamidojo Bintaro, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 2011.
- Taziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerinthan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Toman Sony Tambunan, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Graha Ilmu,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Purungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali

Muhammad Harfin Zuhri, Ma, 2014. “*Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*” Vol. 19. NO. 01. Januari-Juni 2014. 43

Zhada Khamami dan Syarif Ibnu Mujaer, *Fiqh Siyasah (Doktrin Pemikiran Politik Islam)*, Jakarta : Erlangga, 2006.

PERUNDNANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1.

Peraturan Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 6

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “TINJAUAN FIQIH SIYASAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA DALAM PEREFEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak)” Yang ditulis oleh :

Nama : **MERRY ERA ADRIYANI**
NIM : 11724200888
Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasa

Telah di Munaqasyahkan Pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 11 Oktober 2021
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
Waktu : 13.00 WIB

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Oktober 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji I

Mohammad Abdi Almaktsur, MA

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui

**Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum**

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MERRY ERA ADRIYANI
 NIM : 11724200888
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 Judul : TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 DALAM PERSEFEKTIF FIQIH SIYASAH (Study di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak)

Pembimbing : Haswir, M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 1 November 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 September 2021

Un.04/F.I/PP.00.9/9087/2021

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MERRY ERA ADRIYANI
NIM	: 11724200888
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :Tinjauan Fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan peraturan
 menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Perspektif
 Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta dimiliki UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dianggap mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/43899
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/VI/PP.009/9087/2021 Tanggal 22 September 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MERRY ERA ADRIYANI |
| 2. NIM / KTP | : 11724200888 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA |
| 7. Lokasi Penelitian | : KAMPUNG MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK |

dengan ketentuan sebagai berikut:

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 September 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Pembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Siak
- Up. Kabag Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAHAN KABUPATEN SIAK

KECAMATAN MINAS

KAMPUNG MINAS TIMUR

JL. PERAWANG KM 04 MINAS TIMUR KODE POS 28685

Minas Timur, 7 Juni 2021

Kepada Yth,

KETUA RT 001 RW 002

Kampung Minas Timur

Di

Minas

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kiranya Bapak dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian

Nama

: **MERRY ERA ADRIYANI**

NIM

: 11724200888

Pekerjaan

: Mahasiswa

Jurusan / Jenjang

: Hukum Tata Negara / S 1

Fakultas

: Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Alamat

: JL Perawang RT 001 RW 002 Kampung Minas Timur Kec. Minas Kab. Siak

Untuk melakukan penelitian di wilayah saudara guna mengumpulkan data/informasi penelitian yang berjudul :

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS KAMPUNG MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya saudara dapat memberikan data/informasi dan bantuan guna kelancaran kegiatan riset ini sepanjang yang bersangkutan melakukan kegiatan yang tidak menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat izin riset ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENGHULU KAMPUNG MINAS TIMUR



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Merry Era Adriyani putri dari pasangan suami isteri M. Amin dan Erna Susanti dan juga sebagai anak Pertama dari 4 bersaudara. Merry Era Adriyani, M. Ariansyah , Syifa Asyafia Dan M. Syafiq Alfatih. Lahir pada tanggal 18 Oktober 1999 di Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah sekolah Dasar 005 Kampung Minas Timur

Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Pondok Pesantren Baiturrahman AnNizhom Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak, kemudian Lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan studinya ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Huykum Tata Negara (Siyasah),

Berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga, kerabat, dan teman-teman serta bimbingan dari dosen-dosen Fakultas Syariah Dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 DALAM PERSEFEKTIF FIQIH SIYASAH (Study di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak ”**Dan semenjak penulis dinyatakan LULUS dalam ujian munaqasyah Pada Tanggal 11 oktober 2021, penulis berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.H).